

Tantangan Perusahaan Tambang

Pada umumnya, tambang terletak di wilayah yang belum berkembang secara ekonomi, maka ada banyak potensi benturan sosial, ekonomi, dan budaya di sini. Operasi tambang memakai mesin-mesin modern yang berada di tengah masyarakat pedesaan yang belum terbiasa menghadapinya. Di tahap awal operasi akan banyak berdatangan tenaga terampil dari berbagai daerah atau bahkan negara lain, sehingga besar kemungkinannya terjadi gesekan budaya antara pendatang dan penduduk setempat.

Kemudian, ada pemakaian lahan yang jika tidak ditangani secara seksama bisa menimbulkan konflik apabila ada pihak yang merasa tidak memperoleh ganti rugi yang memadai. Bisa juga terjadi bahwa penerima ganti rugi dinyatakan bukan sebagai pihak yang berhak. Sementara itu, dari segi tenaga kerja berpotensi muncul persepsi bahwa suatu kelompok masyarakat, bisa etnik, desa atau lapisan sosial yang berbeda mendapat peluang yang lebih besar dari lainnya sehingga menimbulkan kecemburuan atau lebih parah lagi konflik horizontal.

Dari segi lingkungan, operasi tambang yang tidak mengikuti standar praktik tambang terbaik (*best mining practice*) sangat berpotensi menimbulkan pencemaran dan kerusakan lingkungan yang parah. Oleh karena itu, industri ini memerlukan

penanganan yang profesional dan pengawasan yang ketat. Pencemaran pun banyak sumbernya, bisa dari debu tambang, tumpahan bahan bakar dan pelumas alat-alat berat, serta kendaraan operasi di tambang dan limbah sisa galian.

Apabila masyarakat mempunyai keluhan yang tidak dapat segera diatasi maka yang sering terjadi adalah menutup jalur logistik menuju lokasi. Tambang beroperasi 24 jam selama tujuh hari seminggu dan kelancaran operasi sangat bergantung kepada pasokan terus menerus bahan bakar, bahan pelumas, batu gamping untuk menetralkan asam, suku cadang, peralatan pengganti dan lain-lain. Gangguan pada jalur logistik sehari saja dapat menimbulkan efek berantai. Jelaslah bahwa amat mudah “mencekik” leher perusahaan pertambangan.

Kegiatan pertambangan memang penuh risiko dan tidak dapat dijalankan dengan sembrono. Memperoleh “*social license to operate*” (baca PR INDONESIA Edisi Januari 2018) di industri tambang jauh lebih pelik dan rentan dibandingkan kegiatan bisnis lainnya. Di berbagai wilayah yang sudah terbiasa dengan kegiatan tambang seperti Kalimantan Timur, Sumatera Selatan dan Sumatera Barat, pada umumnya masyarakatnya lebih bisa menerima kehadiran tambang. Lain halnya kalau kegiatan tambang baru untuk pertama kalinya masuk ke suatu kawasan di mana masyarakatnya masih awam tentang kegiatan ekonomi ini.

Lengkap dan Jangka Panjang

Kiroyan Partners pernah mendapatkan klien perusahaan tambang yang sudah cukup jauh kegiatan eksplorasinya. Perusahaan ini sudah mempunyai keyakinan tinggi mengenai nilai keekonomian bahan tambang yang akan digali dan akan melanjutkan ke tahapan menambang. Sebelum mulai menambang

harus disiapkan berbagai konstruksi bangunan untuk fasilitas penunjang, instalasi pengolahan limbah dan mesin penggiling maupun perumahan karyawan. Persoalannya adalah di kawasan ini belum pernah ada kegiatan pertambangan.

Kami melakukan penelitian kemasyarakatan yang komprehensif. Dari *stakeholder analysis*, *issues identification*, sampai ke *stakeholder engagement strategy* dengan memperhatikan semua faktor yang telah digambarkan di atas. Berangkat dari kesimpulan yang diambil dari studi kemasyarakatan ini, kami juga membuat rekomendasi mengenai proyek-proyek *community development* apa yang paling tepat bagi masyarakat setempat.

Konsekuensi dari peningkatan kegiatan perusahaan dari tahapan eksplorasi menuju ke konstruksi tambang adalah ragam *stakeholder*-nya yang bertambah. Di sisi pemerintah saja jumlah instansi pemerintah yang harus terlibat bertambah secara signifikan. Apalagi pada saat itu akan terjadi Pilkada, sehingga dalam *stakeholder analysis* sudah harus diperhitungkan dinamika sosial politik yang akan terjadi.

Saat ini klien tersebut sudah memasuki tahapan produksi selama beberapa tahun dan studi-studi yang kami lakukan di awal menjadi panduan bagi perusahaan dalam berinteraksi dengan masyarakat untuk mempertahankan *social license to operate*. Pekerjaan di perusahaan tambang ini merupakan contoh pekerjaan *public affairs* yang lengkap dan jangka panjang, termasuk memberikan pelatihan kepada para eksekutifnya tentang aspek-aspek kemasyarakatan yang perlu diperhatikan. Karena *public affairs* adalah proses dan kegiatan komunikasi yang sesuai dengan serta memperhatikan konteks sosial, budaya, ekonomi dan politik. ●



Noke Kiroyan

Chairman & Chief Consultant
Kiroyan Partners.